Halaman

Sistem Pengendalian Internal Bank Sumut Bobrok

Dari Halaman 1

Bank Sumut telah dirancang secara struktural, namun pelaksanaannya belum berjalan efektif dan belum mampu menjamin pengendalian risiko kredit secara memadai.

Pengawasan Lemah dan Budaya Pengendalian Tak Jalan

Dalam temuan BPK, PT. Bank Sumut belum memiliki peraturan internal yang sejalan dengan SE OJK 35/2017 mengenai sistem pengendalian

Lebih parah lagi, pelatihan pegawai dalam pengelolaan kredit dan fungsi pengawasan internal masih terbatas.

BPK juga mencatat, Bank Sumut belum pernah menggelar pelatihan pengadaan barang/ jasa untuk pengelola kredit berbasis Surat Perintah Kerja (SPK) dan Kredit Modal Kerja Transaksional Rekanan (KMK-TR). Kondisi ini disebut memperbesar risiko kesalahan dalam penyaluran dan pengawasan kredit.

338 Pegawai tak Bersertifikat Risiko

Aspek identifikasi dan penilaian risiko pun dinilai lemah. BPK menemukan sebanyak 338 pegawai pengelola kredit belum memiliki sertifikasi manajemen risiko perbankan.

Selain itu, analisis risiko yang disusun Divisi Manajemen Risiko tidak digunakan sebagai acuan utama oleh Divisi Kredit, Divisi Ritel. dan cabang-cabang dalam memasarkan produk kredit. Akibatnya, proses penyaluran kredit rawan terjadi tanpa dasar analisis risiko yang

Four Eyes Principle Gagal Dijalankan

Dalam aktivitas pengendalian, BPK menemukan Divisi Credit Review gagal menjalankan prinsip "four eyes principle"—yakni mekan-isme dua lapis pemeriksaan kredit sebelum realisasi.Ironisnya, pemeriksaan justru dilakukan setelah kredit direalisasikan.

BPK juga mengungkapkan belum adanya basis data agunan dan dokumen jaminan kredit yang terintegrasi. Lemahnya monitoring dan supervisi membuat sejumlah kredit SPK dan KMK-TR macet.

Selain itu, risalah kunjungan monitoring kredit tidak dicatat konsisten, dan pengelolaan asuransi kredit dinilai buruk. Tercatat 194 klaim asuransi ditolak oleh pihak asuradur.

Aplikasi Tak Berfungsi

Temuan lain, BPK menyebut sistem informasi Bank Sumut belum mendukung pengambilan keputusan kredit secara akurat.

Data keluaran sistem OLIBs yang menjadi dasar analisis kredit tidak menggambarkan rekam jejak lengkap debitur. Bahkan, beberapa informasi penting seperti agunan dan asuransi tidak diwajibkan diisi.

Selain itu, Bank Sumut tidak memiliki data pemetaan debitur grup, sementara aplikasi Sistem Manajemen Dokumen (SMD) yang berisi kebijakan dan perjanjian kerja sama justru tidak dapat diakses selama masa pemeriksaan.

Rekomendasi BPK

Dalam aspek pemantauan, BPK menyoroti

bahwa tidak semua rekomendasi auditor internal maupun eksternal telah ditindaklanjuti.

BPK menegaskan, kelemahan dalam SPI Bank Sumut telah memicu 14 temuan pemeriksaan terkait pengelolaan kredit, yang meliputi:

- 6 temuan penyaluran kredit,
- 2 temuan operasional kredit,
- 3 temuan monitoring kredit, dan - 3 temuan penanganan kredit bermasalah.
- "Secara keseluruhan, SPI PT Bank Sumut telah dirancang dengan baik, namun belum sepenuhnya dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian," tulis BPK dalam laporannya.

BPK merekomendasikan agar Direktur Utama PT Bank Sumut segera memperbaiki seluruh kelemahan tersebut dan memperkuat sistem pengendalian internal guna mencegah terulangnya penyimpangan dan risiko kredit bermasalah.

Persimpangan Tata Kelola

Temuan BPK ini menambah daftar panjang persoalan tata kelola Bank Sumut yang selama dua tahun terakhir kerap disorot publik. Dari kasus rekrutmen direksi, transparansi kredit, hingga dugaan penyimpangan dalam proyekproyek pembiayaan daerah.

Dengan posisi Bank Sumut sebagai pengelola dana keuangan daerah dan kredit program strategis, kelemahan SPI dapat menjadi ancaman serius bagi stabilitas keuangan daerah dan citra tata kelola pemerintahan di Sumatera

Buruh Tuntut Kenaikan ...

Dari Halaman 1

mencukupi kebutuhan," katanya.

Sunarno juga menyinggung soal banyaknya buruh yang menjadi korban PHK dalam satu tahun belakangan. Ia memprotes alasan perusahaan melakukan PHK karena bangkrut tapi tidak transparan dalam laporan

"PHK alasan pailit tapi tidak terbuka. Kita desak pemerintah dan DPR agar bisa tangani kasus-kasus PHK buruh," katanya.(cnni/js)

Tragedi Masjid Agung Dari Halaman 1

yang membutuhkan.

Mungkin sudah waktunya masjid kembali membuka pintu, bukan hanya untuk salat, tapi juga untuk kemanu-

Sebab rumah Allah sejatinya bukan milik takmir, bukan pula milik pengurus, melainkan milik semua hamba yang mencari kedamaian di bawah langit yang sama.(*)

Polisi Gelar Perkara

Dari Halaman 1

"Iya betul (gelar perkara penetapan tersangka)," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto saat dikonfirmasi.

Budi menerangkan, sebelum melakukan gelar perkara, penyidik telah melakukan asesmen bersama para ahli dan melibatkan pihak eksternal seperti Kompolnas.

"Iya asesmen dengan para ahli baru selesai dan akan dilanjutkan gelar perkara menghadirkan pengawasan internal," ucap Budi.

Polda Metro Jaya mengusut enam laporan polisi terkait tudingan ijazah palsu Jokowi. Dari enam laporan itu, salah satunya dilaporkan langsung oleh Jokowi.

Jokowi melayangkan laporan terkait dugaan fitnah atau pencemaran nama baik buntut tudingan ijazah palsu. Dalam laporan itu, Jokowi melaporkan soal dugaan pelanggaran Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 311 KUHP dan atau Pasal 305 Jo 51 ayat 1 UU ITE.

Setelah diselidiki, polisi telah menaikkan status laporan yang dilayangkan Jokowi ke tahap penyidikan. Hal ini berdasarkan gelar perkara di mana penyidik menemukan ada unsur pidana di dalamnya.

Sedangkan untuk lima laporan lain, tiga di antaranya juga naik ke tahap penyidikan. Sedangkan dua laporan lainnya, dicabut oleh pihak pelapor.(cnni/js)

Hidayah

Kebangkitan Islam di Barat

Dari Halaman 1

Jika yang dimaksud "kebangkitan Islam" adalah kembalinya Islam sebagai kekuatan politik ideologis seperti pada masa klasik, jawabannya tentu tidak. Namun jika dimaknai sebagai kebangkitan representasi Muslim yakni tampilnya generasi Muslim sebagai aktor politik yang sah, kredibel, dan diterima oleh masyarakat non-Muslim maka jawabannya ya. Inilah bentuk baru kebangkitan Islam yang lebih bersifat sosiologis dan kultural, bukan ideologis

Sadiq Khan, anak sopir bus asal Pakistan, memenangkan kursi Wali Kota London sejak 2016. Ahmed Aboutaleb, imigran dari Maroko, memimpin Rotterdam dengan citra sebagai wali kota yang tegas sekaligus inklusif. Kini Zohran Mamdani, keturunan Uganda–India, menandai babak baru dengan membawa politik progresif di New York-kota simbol kapitalisme global. Mereka semua memiliki kesamaan: lahir dari komunitas minoritas Muslim, tumbuh dalam sistem sekuler Barat, namun berhasil menembus dinding politik yang dulu hanya dikuasai oleh elite kulit putih dan

Sosiolog agama Olivier Roy dan Jocelyne Cesari menyebut fenomena ini sebagai "normalisasi Islam di ruang publik Barat." Artinya, Islam tidak lagi dilihat sebagai ancaman, melainkan bagian sah dari identitas warga negara modern. Para pemimpin Muslim ini menang bukan karena menjual isu agama, tetapi karena mengusung nilai-nilai universal yang juga diajarkan Islam: keadilan, kesetaraan, dan kepedulian sosial

Kemenangan pemimpin Muslim di kota-kota global juga menandakan bahwa demokrasi Barat, meski penuh kontradiksi, tetap memiliki kemampuan memperbaiki dirinya. Setelah dua dekade gelombang Islamofobia pasca-9/11, masyarakat tampak mulai membuka diri terhadap pemimpin dari latar belakang Islam. Fakta bahwa seorang Muslim bisa memimpin kota seperti London atau New York membuktikan bahwa integrasi, bukan asimilasi, adalah jalan terbaik dalam masyarakat multikultural.

Namun, penting disadari bahwa kemenangan ini tidak berarti dominasi Islam di Barat. Mereka tidak membawa simbol keagamaan sebagai ideologi politik. Sebaliknya, mereka justru memperlihatkan bahwa nilai-nilai Islam bisa hidup harmonis dalam sistem demokrasi sekuler tanpa harus menuntut penegakan syariat. Inilah bentuk baru kebangkitan Islam yang lebih substantif: Islam hadir sebagai moralitas publik, bukan sebagai simbol politik.

Secara simbolik, kemenangan tokoh-tokoh Muslim di Barat menegaskan bahwa Islam bukanlah antitesis modernitas. Ia menunjukkan bahwa generasi Muslim diaspora telah mampu beradaptasi, berkontribusi, dan bahkan memimpin dalam sistem yang plural. Ini sekaligus menjadi koreksi terhadap pandangan orientalis yang selama ini menganggap Islam dan demokrasi tidak mungkin berdampingan.

Namun, kebangkitan ini juga menghadirkan tantangan baru. Para pemimpin Muslim sering menghadapi tekanan ganda: dari kelompok Islam konservatif yang menuntut mereka lebih "Islami", dan dari kelompok kanan populis yang curiga terhadap identitas mereka. Sadiq Khan, misalnya, kerap diserang dengan ujaran kebencian berbasis agama. Mamdani pun menghadapi dilema politik ketika harus menyeimbangkan sikap terhadap isu Palestina-Israel di tengah sensitivitas politik Amerika.

Dengan demikian, kemenangan pemimpin Muslim di Barat bukanlah tanda lahirnya "kekuasaan Islam baru", melainkan tanda munculnya Islam yang tercerahkan—Islam yang berbaur dengan nilai-nilai kemanusiaan universal. Mereka membawa Islam keluar dari stigma dan mengembalikannya ke hakikat aslinya: rahmat bagi seluruh alam.

Kebangkitan ini juga menjadi pesan penting bagi dunia Islam sendiri. Bahwa Islam tidak harus tampil dalam bentuk negara Islam atau partai Islam untuk berpengaruh. Kehadiran pemimpin Muslim yang jujur, inklusif, dan kompeten justru menjadi dakwah yang paling efektif. Dari masjid menuju balai kota, Islam kini berbicara lewat tindakan, bukan retorika

Muhri Fauzi Hafiz: Jajaran Direksi Layak Diganti

Dari Halaman 1

perbaiki kinerja internal.

"Mereka hanya menyampaikan laporan model Asal Bapak Senang (ABS) ke Gubernur," ujar Muhri, baru-baru ini.

Selain itu, ia menyoroti kenaikan rasio kredit bermasalah (NPL Gross) pada September 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan manajemen risiko Bank Sumut melemah.

Muhri juga mengungkapkan, hak pegawai berupa Bankes tidak dibayarkan, sementara direksi justru tetap mengambil tentiem atau bonus tahunan

"Pegawai dikorbankan, direksi berpesta

bonus," sindirnya.

Tak berhenti di situ, ia menilai Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Sumut kini hidup segan mati tak mau tanpa ada inovasi dan perhatian dari jajaran direksi.

Hal lainnya, Muhri menuding direksi tidak berani tampil menjelaskan persoalan publik secara terbuka khususnya kepada media.

"Mereka selalu lempar batu sembunyi tangan, bersembunyi di balik Gubernur Bobby Nasution ketika dikritik publik," pungkasnya.

Terakhir, berdasarkan temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor 97/LHP/XVIII.MDN/12/2023 tentang LHP Kepatuhan Atas Pengelolaan Kredit Tahun Buku 20222 hingga Triwulan Ill 2023. Muhri

Fauzi Hafiz menemukan banyak terjadi dugaan penyalahgunaan wewenang dan tanggung jawab pengurus (Dewan Direksi) yang tidak berjalan sesuai ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

"Temuan BPK itu jelas mengindikasikan adanya penyimpangan dan pelanggaran hukum berat, sehingga aparat penegak hukum juga harus berani memeriksa semua jajaran direksi," ungkapnya.

Untuk itu, Muhri berharap Gubernur Sumut Bobby Nasution selaku pemegang saham pengendali dapat segera melakukan evaluasi menyeluruh dan perombakan direksi demi mengembalikan kepercayaan publik terhadap Bank Sumut.(A-10)

Komisi III Desak Polisi Usut Dalang Pembakar

Dari Halaman 1

"Kita tanpa suuzon berharap kebakaran yang dialami hakim Tipikor di PN Sumut ini polisi harus mengungkap, motif dalang atau siapa pelaku kebakaran rumah yang dinilai janggal," kata Lallo saat dihubungi, Kamis (6/11).

Politikus Partai NasDem itu mengaku tak ingin insiden itu menjadi preseden buruk terhadap penegakan hukum ke depan. Mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto, kata dia, hakim merupakan benteng terakhir untuk mencari keadilan.

"Jangan sampai teror yang banyak dialami penegak hukum ini, kemudian menurunkan

tekad untuk memberantas korupsi tadi yang mana beliau sedang menangani sebuah kasus korupsi," katanya.

Sementara, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PAN, Sarifuddin Sudding menilai insiden tersebut tidak bisa dipandang sekadar kebakaran biasa.

Sudding meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit menurunkan tim investigasi khusus dan memastikan proses penyelidikan dilakukan secara terbuka dan profesional.

"Kasus ini tidak boleh berhenti pada kesimpulan 'kebakaran biasa'. Konteksnya menyentuh jantung sistem keadilan kita dan publik berhak tahu kebenaran yang sesungguhnya," kata Sud-

ding. Kebakaran rumah milik Hakim Khamozaro terjadi saat seluruh penghuni sedang tidak berada di lokasi.

Meski tak ada korban dalam kejadian tersebut, sebagian bagian rumah khususnya ruang kerja dan kamar utama hangus terbakar dengan kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta

Khamozaro Waruwu merupakan Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) proyek jalan senilai sekitar Rp231 miliar dan melibatkan mantan Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara Topan Ginting.(cnni/js)

KPK Fokus Selidiki Dugaan Korupsi Pengadaan

Dari Halaman 1

"KPK fokus di proses hukumnya terkait dengan pengadaannya, kita fokusnya di situ. Dalam proses penyelidikan ini tentu KPK fokus untuk menemukan dugaan peristiwa pidananya, kita masih di tahap itu," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Kantornya, Jakarta, Kamis

Budi mengatakan, pernyataan Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu bukan merupakan bentuk intervensi. Ia mengaku lembaga antirasuah menganggap mendapat dukungan untuk mencari peristiwa pidana terkait kereta cepat tersebut.

"Tentunya itu adalah sebuah dukungan ter-

hadap program-program presiden, pemerintah, karena kita menyadari bahwa dengan adanya korupsi, maka kemudian setiap rupiah untuk pembangunan, setiap rupiah yang digelontorkan untuk program-program presiden dan pemerintah itu juga kemudian terdegradasi karena korupsi," kata Budi.

"Oleh karena itu, upaya-upaya yang KPK lakukan tentunya adalah untuk mendukung program-program pemerintah tersebut," ujarnya.

Sebelumnya, saat konferensi pers acara peresmian Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa (4/11), Prabowo menyampaikan sejumlah poin merespons polemik utang Whoosh.

Di antaranya Prabowo mengambil tanggung jawab penuh atas proyek Whoosh dan menegaskan tidak ada masalah yang perlu dikhawatirkan dan transportasi publik tidak seharusnya hanya berdasarkan untung-rugi, tetapi pada manfaat yang diberikannya kepada masyarakat.

Selain itu, Prabowo juga menyampaikan transportasi massa adalah bentuk kewajiban negara untuk melayani publik atau public service

Hal itu ditunjukkan pemerintah melalui pemberian subsidi transportasi publik sebesar 60 persen dan masyarakat hanya membayar sebesar 20 persen.

"Enggak usah khawatir apa itu ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah, saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan, kita hitung, enggak ada masalah itu ya," kata Prabowo.(cnni/js)

Petinggi Muhammadiyah & PBNU Dukung

Dari Halaman 1

tokoh penting dalam sejarah Indonesia yang layak memperoleh penghargaan atas pengabdian dan kontribusinya selama masa perjuangan

maupun kepemimpinan nasional. "Kami mendukung Bapak Soeharto sebagai pahlawan nasional karena beliau sangat berjasa kepada Republik Indonesia, sejak masa revolusi kemerdekaan hingga masa pembangunan," kata Dadand, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (5/11).

Menurut dia, Soeharto turut berjuang dalam perang gerilya dan memainkan peran penting dalam Serangan Umum 1 Maret 1949, yang menjadi momentum strategis bagi pengakuan kedaulatan Indonesia di mata dunia

Selama menjabat sebagai presiden, lanjutnya, Soeharto juga dinilai berhasil melaksanakan berbagai program pembangunan terencana melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Dadang menambahkan keberhasilan kepemimpinan Soeharto antara lain tercermin dari swasembada beras pada dekade 1980-an, program Keluarga Berencana (KB) yang berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk, serta stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan yang terjaga selama masa pemerintahannya.

"Ketika kita menghargai jasa kepahlawanan seseorang, jangan dilihat dari perbedaan politik atau kepentingan apapun, kecuali kepentingan bangsa dan negara, terlepas dari kekurangan dan kesalahan seseorang," ujarnya.

Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur) turut menyatakan dukungannya terhadap usulan Kementerian Sosial kepada Dewan Gelar untuk menetapkan Soeharto dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Pahlawan

Menurut Gus Fahrur, bangsa Indonesia perlu belajar dari masa lalu baik dari kebaikan maupun kekurangannya untuk membangun masa depan yang lebih bijak dan berkeadaban.

"Dalam tradisi keilmuan Islam, ada kaidah penting: Al-muhafazhah 'ala al-qadim ash-shalih wal akhdzu bil jadid al-ashlah, menjaga yang lama yang baik, dan mengambil yang baru yang lebih baik," ujar Gus Fahrur di Jakarta,

Gus Fahrur menilai Soeharto maupun Gus Dur memiliki kontribusi besar terhadap bangsa dalam dua fase sejarah yang berbeda.

"Pak Harto berjasa besar dalam stabilisasi nasional dan pembangunan ekonomi. Di masa beliau, Indonesia dikenal dunia sebagai salah satu macan ekonomi baru Asia, dengan program pembangunan yang terencana dan stabilitas ekonomi serta keamanan yang tinggi,"

Selain itu, kata Gus Fahrur, Soeharto juga memiliki jasa besar di bidang sosial-keagamaan. Sementara itu, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menurutnya berjasa besar dalam memperjuangkan demokrasi, pluralisme, dan rekonsiliasi bangsa pasca reformasi.

"Keduanya punya jasa luar biasa dalam membangun bangsa di masa-masa sulit. Menetapkan mereka sebagai Pahlawan Nasional bukan berarti meniadakan kritik atas kekurangan

yang pernah ada, tetapi bentuk penghargaan atas jasa besar yang telah mereka berikan," kata

Gus Fahrur. Ketua PBNU ini juga mengapresiasi langkah kementerian Sosial di bawah Menteri Saifullah Yusuf yang tengah selesai memproses sejumlah tokoh yang lantas sudah diserahkan ke Dewan Gelar untuk dianugerahi gelar Pahlawan Na-

sional tahun ini. Gus Fahrur berharap penetapan pahlawan nasional dapat menjadi momentum rekonsiliasi sejarah dan penguatan nilai kebangsaan.

"Semoga dengan penetapan ini, kita semakin menghargai peran semua pihak dalam perjalanan bangsa baik sipil, militer, maupun ulama. Semua punya andil dalam menjaga Indonesia,"

Kementerian Sosial (Kemensos) pada tahun ini telah mengajukan 40 nama tokoh nasional kepada Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) untuk dipertimbangkan menjadi pahlawan nasional. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf

memastikan sebagian besar nama tersebut merupakan hasil pembahasan dari tahun-tahun sebelumnya dan proses penetapan calon itu dilakukan melalui seleksi berlapis yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari masyarakat hingga tim ahli tingkat pusat. Selain Soeharto, sejumlah tokoh lain yang

diusulkan antara lain Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), aktivis buruh Marsinah, Jenderal (Purn) M. Jusuf, Ali Sadikin, KH Bisri Syansuri, Syaikhona Kholil Bangkalan, serta Prof. Mochtar Kusumaatmadja.(ant/js)